

## **bab i**

### **pendahuluan**

#### **1.1. latar belakang**

strategi untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan konsep yang sedang berkembang dalam studi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. konsep ini bertumpu pada prinsip partisipasi, inklusifitas dan efektivitas dalam mengakomodasi suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. beberapa pendekatan teori telah dikembangkan untuk memahami bagaimana aspirasi masyarakat dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, salah satunya adalah teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) dalam "tangga partisipasi warga". teori ini mengkategorikan partisipasi masyarakat ke dalam berbagai tingkatan, mulai dari tokenisme hingga kontrol penuh oleh masyarakat.

dalam perkembangan selanjutnya, konsep governance juga berperan dalam memperkuat strategi pengintegrasian aspirasi masyarakat. Rhodes (1996) memperkenalkan teori governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses kebijakan publik. dalam konteks perencanaan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan. di sisi lain, teori deliberatif Habermas (1984) juga menawarkan perspektif bahwa pengambilan keputusan berbasis wacana dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan melibatkan perspektif masyarakat yang lebih luas.

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu instrumen formal yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan daerah. namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas musrenbang masih dipertanyakan. beberapa penelitian menunjukkan bahwa musrenbang seringkali hanya menjadi formalitas tanpa benar-benar memberikan ruang bagi partisipasi substantif bagi kelompok-kelompok marjinal, termasuk masyarakat adat. hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan bahwa musrenbang benar-benar dapat menjadi wadah yang inklusif dan efektif dalam mengintegrasikan aspirasi.

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjamin partisipasi masyarakat di setiap tingkatan pemerintahan. di Papua, musrenbang memiliki makna strategis karena menjadi wadah bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan konteks sosialbudaya lokal. namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat asli Papua sering kali masih bersifat simbolik dan terbatas. banyak faktor seperti rendahnya literasi perencanaan, keterbatasan kapasitas, ketimpangan akses informasi, serta dominasi elite birokrasi menyebabkan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi.

distrik Malim Simsa di Kota Sorong merupakan wilayah dengan komposisi penduduk heterogen antara masyarakat asli Papua dan pendatang. kondisi ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan musrenbang, terutama dalam representasi dan pengambilan keputusan pembangunan. oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana masyarakat asli Papua berpartisipasi dalam musrenbang di distrik Malim Simsa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas partisipasi tersebut.

provinsi papua barat daya merupakan salah satu provinsi baru di indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2022. sebagai daerah yang masih dalam tahap awal pengembangan kelembagaan, provinsi ini menghadapi tantangan besar dalam memastikan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. penduduk asli papua, yang dikenal sebagai orang asli papua (oap), memiliki posisi yang unik dalam struktur sosial dan politik di wilayah tersebut. namun, partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan masih sangat terbatas.

sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat papua sering kali mengalami marginalisasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. faktor-faktor seperti terbatasnya akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, dan dominasi elit politik menjadi hambatan utama bagi partisipasi mereka. akibatnya, aspirasi masyarakat adat cenderung kurang terakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan melalui musrenbang. hal ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi yang telah lama menjadi masalah di papua. dalam konteks papua barat daya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji strategi yang dapat meningkatkan integrasi aspirasi masyarakat adat dalam musrenbang. studi ini menjadi semakin relevan mengingat papua memiliki karakteristik sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain di indonesia.

dengan demikian, penelitian ini mengkaji bagaimana strategi integrasi dan aspirasi dapat dirancang secara lebih efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. teori partisipasi masyarakat dapat menjadi landasan utama dalam mengembangkan strategi integrasi aspirasi oap. selain itu, pendekatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan deliberatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam musrenbang. studi ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mekanisme musrenbang dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat adat di papua barat daya.

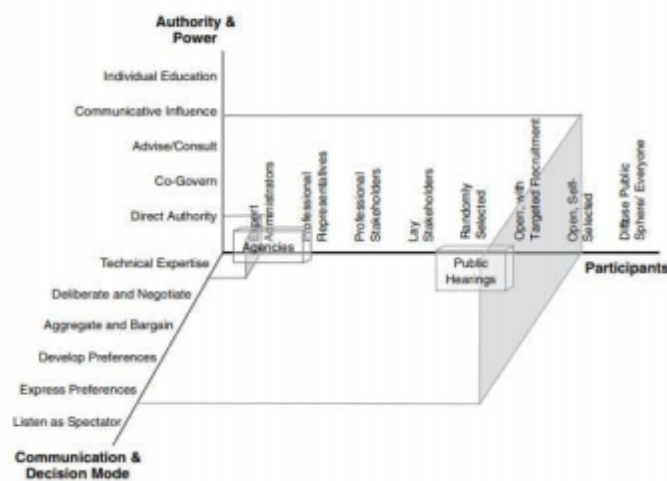
peran aop dalam musrenbang sebagai bentuk pengintegrasian aspirasi masyarakat adat ke dalam berbagai sektor membutuhkan pendekatan multidimensi yang menghargai perspektif budaya mereka yang unik dan mendorong partisipasi aktif. integrasi ini dapat dicapai melalui strategi berbasis masyarakat, pengambilan keputusan partisipatif, dan inisiatif penjangkauan yang tepat sasaran. dalam konteks penelitian dan partisipasi berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat adat dalam penelitian akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan relevansi. sebagai contoh, keterlibatan peneliti aborigin dan penduduk kepulauan selat torres dalam proyek-proyek masyarakat meningkatkan pemahaman mengenai aspirasi dan kesejahteraan mereka (doery, et al., 2022). sementara itu, penggunaan metode partisipatif, seperti lingkaran benang, memungkinkan pengungkapan pandangan masyarakat adat, yang sangat penting dalam perencanaan pengurangan risiko bencana (ali et al., 2021).

lebih lanjut, desain perkotaan dan representasi budaya dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh thompson-fawcett dkk. (2019) kelompok masyarakat adat dapat berperan sebagai pengembang kota, memastikan aspirasi budaya mereka tercerminkan dalam desain perkotaan. pendekatan ini telah berhasil diterapkan di christchurch, selandia baru, di mana sejarah dan nilai-nilai masyarakat adat diintegrasikan ke dalam lingkungan yang dibangun. proses pengambilan keputusan kolaboratif dalam perencanaan kota dapat memperkuat suara masyarakat adat, yang mengarah pada transformasi signifikan dalam lanskap perkotaan. sedangkan barney & williams (2021), membahas bagaimana

inisiatif penjangkauan dan pendidikan, yaitu program penjangkauan yang ditargetkan untuk siswa masyarakat adat dapat meningkatkan aspirasi untuk pendidikan tinggi. penelitian menunjukkan bahwa strategi penjangkauan yang efektif sangat penting untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa pribumi di australia. dengan mengembangkan sumber daya dan strategi berdasarkan umpan balik dari siswa, lembaga pendidikan dapat mendukung aspirasi penduduk asli dengan lebih baik.

dalam konteks penelitian ini, *rumusan masalah* yang mengacu pada teori *partisipasi fung (2006)* berfokus pada tiga indikator utama yang penting dalam menilai efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam musrenbang di provinsi papua barat daya.

gambar 1.1 democracy cube



sumber fung 2006

*teori fung*, menekankan bahwa partisipasi yang efektif tidak hanya melibatkan kehadiran masyarakat dalam forum, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi tersebut memiliki dampak nyata pada kebijakan yang diambil. pertama, pengaruh masyarakat menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana masyarakat adat papua, khususnya orang asli papua (oap), memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dihasilkan melalui musrenbang. musrenbang diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah yang dihasilkan. kedua, akses terhadap informasi berperan penting dalam menentukan efektivitas partisipasi. masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai kebijakan atau proses perencanaan pembangunan akan kesulitan untuk berpartisipasi secara maksimal. oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat adat di papua barat daya memiliki akses informasi yang relevan mengenai kebijakan yang akan dibahas dalam musrenbang. ketiga, keterlibatan dalam pengambilan keputusan adalah dimensi lainnya yang juga penting dalam menilai efektivitas partisipasi. keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana masyarakat adat di papua barat daya terlibat dalam proses

pengambilan keputusan dalam musrenbang dan bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas kebijakan pembangunandaerah.

berdasarkan uraian tersebut, partisipasi masyarakat asli papua dalam musrenbang di distrik malaimsimsa menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam. mengingat pentingnya musrenbang sebagai instrumen perencanaan partisipatif, rendahnya keterlibatan masyarakat asli berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. penelitian ini tidak hanya berupaya memotret tingkat partisipasi masyarakat asli papua, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhinya, serta bagaimana peran pemerintah daerah dapat diperkuat untuk menciptakan ruang partisipasi yang setara dan bermakna.

dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan serta menawarkan rekomendasi kebijakan praktis bagi pemerintah provinsi papua barat daya dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkeadilan sosial bagi orang asli papua, khususnya bagi proses perencanaan pembangunan daerah. oleh karena itu penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

**(1). bagaimana bentuk partisipasi masyarakat asli papua dalam proses musrenbang di distrik malaimsimsa?**

**(2). faktor-faktor apa yang dapat mendorong dan menghambat proses partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang distrik malaimsimsa?**

## 1.2. tinjauan teori

### 1.2.1. konsep partisipasi

partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan telah menjadi isu penting dalam teori demokrasi dan administrasi publik. salah satu teori partisipasi yang banyak digunakan adalah teori partisipasi dari archon fung (2006). fung mengemukakan bahwa partisipasi publik tidak hanya melibatkan penyampaian suara, tetapi juga harus memberikan pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan. fung menciptakan *democracy cube*, sebuah model yang memetakan berbagai mekanisme partisipasi berdasarkan siapa yang berpartisipasi, bagaimana mereka berkomunikasi, dan seberapa besar pengaruh yang mereka miliki terhadap kebijakan atau keputusan publik. fung berpendapat bahwa tidak ada satu model partisipasi yang dapat memenuhi semua tujuan demokrasi sekaligus. oleh karena itu, desain partisipasi harus disesuaikan dengan masalah spesifik yang dihadapi, apakah itu masalah legitimasi, keadilan, atau efektivitas pemerintahan.

selain fung (2006) konsep partisipasi juga telah diungkap oleh cohen & uphoff (1980) yang beranggapan bahwa partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengawannya. sementara itu arnstein (1969) memperkenalkan konsep partisipasi melalui paradigma "*ladder of participation*", yaitu yang menggambarkan tingkat partisipasi dari non-participation melalui manipulasi teknik dan cara sampai pada tingkatan *citizen control* atau pengawasan dan evaluasi oleh masyarakat. mekanisme musrenbang dalam konteks penelitian ini adalah merupakan mekanisme formal perencanaan pembangunan partisipatif yang diatur dalam uu no. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. musrenbang dilakukan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional untuk menjangkau aspirasi masyarakat.

dalam konteks penelitian ini, *konsep fung (2006)* merupakan konsep utama yang digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terkait dengan **fenomena** keterlibatan warga masyarakat lokal dalam forum musrenbang pada distrik malamsamsia. hal ini juga merupakan fokus di mana konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis proses dan bentuk partisipasi warga dalam proses musrenbang di distrik malamsamsia, dengan mengkaji siapa yang terlibat, bagaimana bentuk komunikasi antara peserta dan pemerintah, serta sejauh mana keputusan yang dihasilkan dalam proses tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. indikator seperti tingkat pengaruh masyarakat, akses terhadap informasi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan sesuai dengan dimensi-dimensi yang diidentifikasi oleh fung. dalam teori ini, **fung mengidentifikasi ada tiga dimensi utama** yang juga merupakan bentuk dari pada mekanisme partisipasi yang efektif dalam konteks musyawarah perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

**1. tingkat kehadiran dalam rapat forum musyawarah bagi masyarakat**

indikator pertama dari partisipasi yang efektif adalah sejauh mana partisipasi masyarakat mempengaruhi keputusan dan kebijakan publik. masyarakat yang berpartisipasi harus memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

**2. akses terhadap penyampaian aspirasi dan informasi (*access to information*)**

partisipasi yang efektif memerlukan akses yang setara terhadap informasi yang relevan mengenai kebijakan atau program yang sedang dibahas. dengan demikian, partisipasi tidak hanya bergantung pada kehadiran masyarakat dalam forum, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk mengakses informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

**3. keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan**

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan indikator kuncinya. partisipasi tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan aspirasi, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam tahap penyusunan dan implementasi kebijakan. teori fung ini memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis tingkat partisipasi dalam musrenbang, terutama dalam menilai sejauh mana masyarakat dapat terlibat dan memiliki pengaruh terhadap keputusan yang diambil di tingkat lokal.

berdasarkan konsep fung di atas, dapat dirumuskan beberapa **aspek dan dimensi konsep partisipasi** dalam proses musyawarah pembangunan yang dapat diamati pada data lapangan meliputi:

**a. dimensi kehadiran dalam rapat musyawarah**

**b. dimensi akses dalam partisipasi dan penyampaian gagasan/aspirasi**

**c. dimensi keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan**

ketiga dimensi konsep tersebut merupakan perspektif yang memberikan gambaran terkait dengan bentuk dan proses partisipasi masyarakat lokal dalam melibatkan diri mereka dalam proses perencanaan pembangunan. dalam hal ini proses musrenbang dapat dilihat sejauh mana ketiga dimensi tersebut digunakan oleh kelompok masyarakat lokal dalam meningkatkan kualitas keterlibatan dan partisipasi mereka dalam forum perencanaan pembangunan tingkat distrik malamsamsia

### **1.2.2. partisipasi dalam perencanaan pembangunan**

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) adalah mekanisme perencanaan pembangunan yang diatur oleh pemerintah Indonesia, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang diharapkan menjadi forum yang inklusif, di mana berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat dan kelompok marginal, dapat menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka untuk dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah. Namun, partisipasi masyarakat dalam musrenbang seringkali terbatas pada proses formal yang hanya mencatat masukan masyarakat tanpa benar-benar melibatkan mereka dalam pembuatan keputusan yang substansial.

Samsuddin (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang, sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme musrenbang, yang membatasi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Studi oleh Nugroho (2017) menyatakan bahwa meskipun banyak forum partisipasi publik seperti musrenbang dilakukan, akses informasi yang terbatas dan kurangnya keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sering kali bersifat formalitas. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah musrenbang di distrik Malim Simsa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat OAP untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan, ataukah mereka hanya sekadar menyampaikan aspirasi tanpa dampak nyata pada kebijakan.

Papua, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan masyarakat adat, menghadapi tantangan dalam menerapkan mekanisme partisipasi yang inklusif, terutama bagi orang Asli Papua (OAP). Dalam konteks Papua, partisipasi masyarakat sering kali dibatasi oleh faktor geografis, sosial, dan budaya. Penelitian oleh Bakker (2012) menunjukkan bahwa di Papua, meskipun ada dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik partisipasi. Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi OAP adalah keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan, yang menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses musrenbang. Soeparno (2018) juga mengemukakan bahwa banyak masyarakat Papua yang masih belum mendapatkan pendidikan yang cukup terkait dengan proses administrasi dan pembangunan, sehingga mereka kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan.

Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan di Papua sering kali lebih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif daripada memberi ruang bagi masyarakat OAP untuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil kebijakan. Menurut Sartono (2015), partisipasi masyarakat OAP dalam musrenbang sering kali hanya sebatas hadir dalam forum tanpa dilibatkan dalam proses deliberasi yang lebih mendalam mengenai kebijakan dan perencanaan pembangunan.

### **1.2.3. pengaruh partisipasi terhadap pembangunan lokal di Papua**

Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hadi (2016) dalam penelitiannya

menemukan bahwa di beberapa wilayah papua, partisipasi masyarakat dalam musrenbang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah, terutama jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. namun, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti ketidakmerataan partisipasi antar kelompok sosial dan wilayah, serta dominasi suara dari kelompok-kelompok tertentu.

selain itu, prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan dalam partisipasi harus diperhatikan untuk memastikan bahwa masyarakat oap dapat berperan serta secara efektif dalam musrenbang. *de sousa santos (2002)* dalam penelitian mengenai *partisipasi anggaran* di porto alegre, brasil, menunjukkan bahwa partisipasi yang adil dan inklusif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta keadilan sosial, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti halnya oap di papua. penelitian ini mengadopsi teori *partisipasi* dari *fung (2006)* yang mengidentifikasi tiga indikator utama dalam partisipasi yang efektif, yaitu *tingkat dan pengaruh kehadiran masyarakat, akses terhadap informasi dan aspirasi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan*. dengan menggunakan kerangka ini, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas musrenbang dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat adat papua serta mengusulkan strategi yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

*tingkat pengaruh masyarakat* dalam proses perencanaan pembangunan menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas partisipasi. *fung (2006)* menekankan bahwa partisipasi yang bermakna harus memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan. dalam konteks musrenbang, masyarakat adat harus memiliki ruang yang cukup untuk mengutarakan pandangan mereka dan melihat bahwa aspirasi yang disampaikan benar-benar diakomodasi dalam kebijakan yang diimplementasikan.

*akses terhadap informasi* merupakan faktor penting yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif. masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap informasi mengenai kebijakan dan proses perencanaan pembangunan akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi mereka secara maksimal. oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mencakup penyediaan informasi yang transparan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat papua.

*keterlibatan dalam pengambilan keputusan* mencerminkan sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses formulasi kebijakan. *fung (2006)* menyatakan bahwa tingkat keterlibatan yang tinggi akan menghasilkan kebijakan yang lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dalam konteks papua barat daya, diperlukan mekanisme yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa masyarakat adat benar-benar memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka sendiri.

### **1.3. tujuan dan manfaat**

#### **1.3.1 tujuan penelitian**

tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat adat dalam musrenbang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal.

### 1.3.2 manfaat penelitian

#### a. manfaat akademis

secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, kebijakan pembangunan, dan komunikasi kebijakan. dengan mengkaji partisipasi masyarakat adat dalam musrenbang di provinsi papua barat daya, penelitian ini memperkaya literatur tentang strategi partisipasi masyarakat yang efektif, terutama dalam konteks masyarakat adat yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang memiliki fokus atau lokus serupa, serta memberikan wawasan baru terkait implementasi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat adat.

#### b. manfaat praktis

1. bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti mengenai teori partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan inklusif, serta komunikasi kebijakan, terutama dalam konteks kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat adat. penelitian ini juga diharapkan menjadi wadah bagi peneliti untuk mengaktualisasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa studi, serta memberikan pengalaman dalam mengaplikasikan teori dalam analisis kasus nyata.
2. bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi organisasi pemerintahan di tingkat provinsi papua barat daya, terutama dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berbasis pada aspirasi masyarakat adat. hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas musrenbang dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat adat, serta memperbaiki mekanisme partisipasi yang ada.
3. bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana proses partisipasi dalam musrenbang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan di 9 daerah mereka. penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam perencanaan pembangunan dan memberikan gambaran tentang bagaimana suara mereka dapat lebih didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan tingkat pemerintah.

### 1.4. kerangka pemikiran penelitian

konsep partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu keharusan disebabkan oleh berbagai aturan pemerintah yang menghendaki proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan *bottom-up*. demikian pula secara konseptual terdapat secara penjelasan konsep teori yang mendorong pemanfaatan mekanisme partisipasi warga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas ketercapaian indikator pembangunan yang mengarah pada proses melibatkan warga dalam mekanisme perencanaan.

salah satu dimensi proses perencanaan pembangunan di daerah adalah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau dikenal dengan istilah "musrenbang" di mana tokoh masyarakat dan aparat perencanaan daerah bertemu dalam forum dalam membicarakan proses dan program pembangunan yang harus dilaksanakan. partisipasi warga dalam mekanisme musrenbang dapat mendorong kekuatan perencanaan yang melibatkan mereka sehingga proses

implementasi program pembangunan akan dapat mendorong efektivitas yang berakardand berdasarkan padamekanisme partisipasi yang terbangun.

berbagai konsep danteori serta pendekatan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunantelahdiungkappadabagian teoridalampenelitian ini. untuk keperluan penyusunan kerangka konseptual, maka konsep fung (2006) sebagai konsep utama dalam penelitian untuk melihat dan menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat lokal serta mekanisme partisipasi yang berlangsung didasari pada konsep dan indikator yang dikembangkan fung meliputi tiga indikatoryaitu:

- a. dimensi kehadiran dalam rapat musyawarah
- b. dimensi akses dalam partisipasi dan penyampaian gagasan/aspirasi
- c. dimensi keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

sementara itu terdapat sejumlah faktor yang turut serta menjadi bagian fokus penelitian ini sebagai upaya untuk menggambarkan bahwa proses partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan faktor pendorong partisipasi dalam proses pembangunan menuai berbagai kendala baik secara internal maupun secara eksternal. dalam kaitan ini cohen & uphoff, n. (1980) menjelaskanbahwa peran *local leader* dalam perencanaan pembangunan merupakan unsur ketokohan yang banyak memberikan pengaruh pendorong terhadap produk keputusan perencanaan pembangunan, di samping kebutuhan akan realitas kebutuhan pembangunandarimasyarakat lokal. dalam hal demikian uphoff jugamemandang bahwa pengakuan adat lokal merupakan faktor pendorong kuat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. demikian pula, *arnstein* (1969 ) dalam menilai faktor penentu yang menghambat proses partisipasi di mana masyarakat hadir secara fisik tetapi belum memiliki kendali atau pengaruh substantifdalam proses perencanaan. berkenaandengan faktor penghambat partisipasi, maka faktor substantif kemampuan masyarakat serta kultur khirarkhis dalam proses partisipasi substantif menuntut adanya kemampuan masyarakatuntuk mengartikulasikan kebutuhan, berargumentasi, dan bernegosiasi serta minimnya mekanisme umpan balik (pretty, 1995). cohen & uphoff (1980) menggambarkan bahwa dominasi mekanisme perencanaan *top-down* bisa saja menjadi kendala dan penghambat proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

adopsi berbagai konsep terhadap sejumlah faktor yang dapat menjadi pendorong dan penghambat dalam proses partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang tingkat kecamatan (distrik) pada kasus distrik malaimsimsa papua barat daya dapat disimpulkan ke dalam kategori berikut:

faktor pendorong, meliputi:

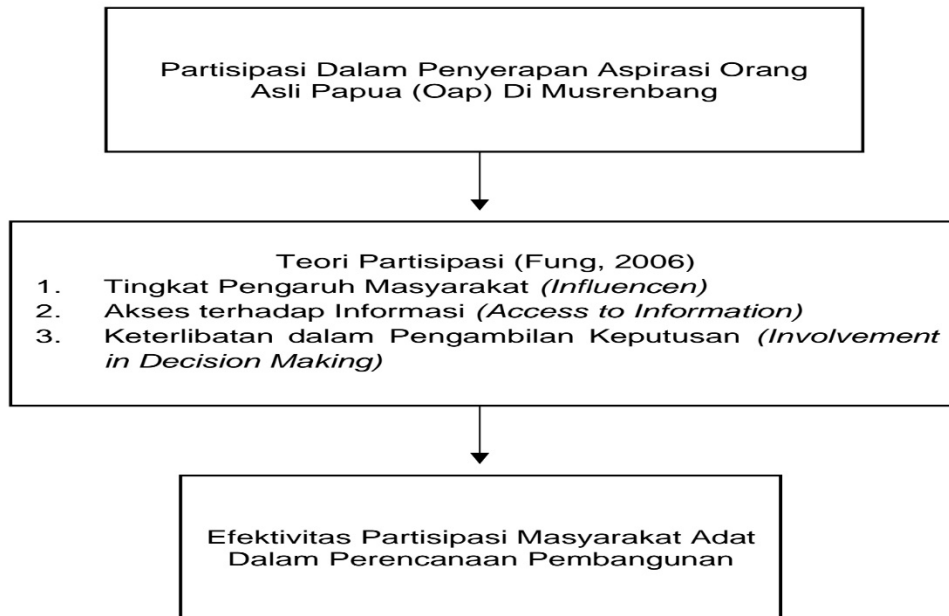
- a) peran tokoh adat dan tokoh masyarakat
- b) kesadaran akan kebutuhan pembangunan
- c) dukungan pemerintah lokal
- d) pengakuan terhadap nilai dan mekanisme adat

faktor penghambat, meliputi:

- a) keterbatasan kapasitas dan pendidikan masyarakat
- b) faktor kultur hierarkis dan relasi kuasa
- c) minimnya transparansi dan umpan balik
- d) faktor dominasi pendekatan top-down

berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti menyusun kerangka pikir dan visual kerangka penelitian sebagai berikut:

**gambar 1.2** kerangka pikir,



*sumber : fung 2006*

## **bab ii**

### **metode penelitian**

#### **2.1. pendekatan penelitian**

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi pengintegrasian aspirasi orang asli papua (oap) dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan publik yang kompleks. menurut creswell (2018), metode kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu. oleh karena itu, pendekatan ini relevan dengan penelitian yang berfokus pada bagaimana aspirasi orang asli papua diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunandaerah.

#### **2.2. desain penelitian**

desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena tertentu dengan menganalisis data yang diperoleh dari satu atau beberapa kasus yang dipilih. (menurut creswell, j. d & creswell, j. d, 2018) studi kasus adalah desain penelitian yang ditemukan di banyak bidang, terutama evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus, seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. pemilihan studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. desain ini membantu untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme musrenbang dilaksanakan dan bagaimana aspirasi oap dapat diintegrasikan secara efektif dalam kebijakan pembangunandaerah. studi kasus yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan pola keterlibatan oap dalam musrenbang dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengintegrasian aspirasi mereka.

#### **2.3. desain penelitian**

##### **2.3.1 penentuan informan**

partisipan penelitian terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam musrenbang, termasuk perwakilan pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, dan perwakilan komunitas oap. pemilihan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengalaman langsung dalam proses musrenbang dan yang dapat memberikan perspektif yang berharga tentang isu-isu yang diteliti (creswell, 2018).

adapun informan yang dipilih secara purposif meliputi:

- . kepala distrik malaimsimsa
- . tokoh adat dan tokoh masyarakat asli papua .
- perwakilan perempuan dan pemuda oap
- . aparat bappeda kota sorong
- . peserta musrenbang kelurahan

##### **2.3.2. teknik pengumpulan data**

teknik pengumpulan data merupakan langkah dan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan penelitian. dalam penelitian kualitatif, creswell (2018) menyebutkan bahwa

terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen.

**a. observasi**

observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan. dalam penelitian ini, observasi dilakukan selama proses musrenbang untuk memahami secara langsung dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dan bagaimana aspirasi oap diakomodasi dalam diskusi perencanaan pembangunan.

**b. wawancara**

wawancara mendalam (in-depth interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi dari berbagai informan. wawancara dilakukandengan menggunakan pendekatan semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman dan pandangan peserta mengenai integrasi aspirasi oap dalam musrenbang. wawancara dilakukan dengan perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok oap untuk memahami hambatan dan peluang dalam mekanisme partisipasi mereka.

**c. studi dokumen**

data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, seperti laporan hasil musrenbang, kebijakan daerah terkait partisipasi masyarakat, dan dokumen akademis yang mendukung analisis penelitian. studi dokumen ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan formal mendukung atau menghambat integrasi aspirasi oap dalam proses musrenbang.

### **2.3.3 teknik analisis data**

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model miles and huberman (2014) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. adapun langkah-langkah yang dilakukanyaitu :

- (1). reduksi data, yaitu merangkum data yang sudahdiperoleh dan memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan analisis data selanjutnya.
- (2). penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. penyajian data merupakan kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan dengan tujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikandalambentuk tabel atau uraian penjelesan.
- (3). penarikan kesimpulan atau verifikasi, dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

### **2.3.4 validitas dan reliabilitas data**

validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengandata yang dapat dilaporkan oleh peneliti. cresswell mengemukakan bahwa validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudahakurat dari sudutpandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum (cresswell, 2013). strategi validitas yang digunakan dalam ini sebagai berikut.

1. validitas:

(a). triangulasi sumber data: menggunakan berbagai sumber data untuk membangun bukti yang koheren untuk tema-tema dalam studi, seperti memeriksa bukti dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

(b). member checking: mengonfirmasi keakuratan temuan dengan membawa kembali hasil penelitian kepada pemerintah, operator, dan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik tentang keakuratan dan relevansinya.

©. deskripsi yang kaya dan detail: menyajikan temuan dengan deskripsi yang kaya dan detail tentang implementasi kebijakan transportasi umum, sehingga pembaca dapat merasakan pengalaman langsung dilapangan.

(d). pengklarifikasi bias peneliti: merinci bias yang mungkin dibawa oleh peneliti ke dalam studi, seperti latar belakang dan pandangan pribadi mereka, untuk memastikan keterbukaan dan kejujuran dalam analisis temuan.

2. reabilitas:

(a). pemeriksaan transkrip: memeriksa transkrip wawancara dan diskusi untuk memastikan ketepatan dan konsistensi dalam penyampaian informasi dari responden.

(b). pemeliharaan konsistensi dalam pengkodean: memastikan bahwa definisi kode dan makna kode tetap konsisten selama proses analisis data untuk menghindari pergeseran atau perubahan yang tidak diinginkan.

©. periksa silang kode: mengadopsi praktek memeriksa hasil analisis antara peneliti yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dalam penafsiran data.

dengan menerapkan strategi-strategi ini, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reabilitas hasil penelitian ini

